

Tribun HARIAN PAGI Jateng

The Best of Java Newspaper 2017

SPIRIT BARU JAWA TENGAH

Alamat Redaksi/Iklan:
Gedung Kompas Gramedia
Jl. Menteri Supeno 30
Semarang 50241
Telp: (024) 845 5959
Fax: (024) 845 6776

MINGGU KLIWON

4 FEBRUARI 2018

18 JUMADIL AWAL 1439

TAHUN IV/NOMOR 1721

Harga khusus Solo: Rp 2.000
Langganan: Rp 55.000

➔ www.tribunjateng.com

Dikuasai Jejaring Mafia

REKANAN yang masuk daftar hitam (*black list*) atau bermasalah di suatu daerah, masih sangat mungkin memenangkan lelang untuk proyek lainnya di suatu daerah lain. Ini lantaran, tak ada database bersama antara suatu daerah dengan daerah lain, terkait rekanan yang masuk kategori *black list*.

"Setahu saya, belum ada database yang terkoneksi atau online, terkait rekanan yang nakal," kata Kaprodi Doktor Administrasi Publik Universitas Diponegoro (Undip), Sri Suwatri, kepada *Tribun Jateng*, Sabtu (3/2).

Disampaikan, selain itu terkadang kontraktor menggunakan bendera pihak lain, untuk mengikuti tender atau lelang di suatu daerah yang berbeda. Sehingga, jejak mereka tak mudah terlacak.

"Bisa saja si A masuk *black list* di Semarang, misalnya, lalu kemudian menggunakan nama lain saat mengikuti tender di tempat lain," ucapnya.

Dikuasai Jejaring...

■ DARI HALAMAN 1

Tak hanya itu, menurut dia, seringkali pemenang lelang melakukan sub dalam pengerjaan proyek yang dimenangkan. "Hal-hal seperti ini yang bikin rusak," imbuhnya.

Dituturkan, proses lelang pengadaan barang dan jasa di hampir seluruh wilayah di Indonesia, dikuasai jejaring mafia. Ini, karena lemahnya etika publik dalam proses

pengadaan barang dan jasa.

"Lemahnya penegakan etika publik dalam proses pengadaan barang dan jasa, menjadi problem serius. Mungkin ke depan harus ada undang-undang yang mengatur etika publik, untuk menegakkan etika dalam proses pengadaan barang dan jasa untuk publik," tutur dia.

Terpisah, Koordinator Ko-

mite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi Kolsi dan Nepotisme (KP2KKK) Jateng, Syukron Salam, mengatakan hal senada. Menurut dia, sejatinya sudah ada sistem yang integral, di mana kontraktor yang masuk daftar *black list* di suatu daerah akan secara otomatis akan masuk dalam daftar hitam di daerah lain.

Dengan syarat, bila pejabat berwenang di daerah ter-

sebut mengirimkan tembusan nama-nama perusahaan atau kontraktor yang masuk daftar hitam ke LKPP.

"Daftar hitam yang tidak ditembuskan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), berlaku sektoral, hanya tempat di mana rekanan tersebut mendapat *black list*. Oleh karena bisa menjadi pemenang di daerah lain," katanya. (yan)